

INTEGRASI DATA ANALYTICS DALAM PERENCANAAN STRATEGIS PEMERINTAH: PENDEKATAN EVIDENCE-BASED UNTUK EFISIENSI PUBLIK

Ruqiah

Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara

ruqiahzahwa@gmail.com

Abstrak

Perencanaan strategis pemerintah sering terkendala dalam pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan efisien akibat keterbatasan data yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan data analytics dalam perencanaan strategis pemerintah dengan pendekatan evidence-based guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas kebijakan publik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kasus di instansi pemerintah daerah, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi data analytics mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat, cepat, dan transparan, sekaligus memperkuat akuntabilitas organisasi publik. Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis, yaitu memberikan kerangka bagi lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan strategi berbasis bukti serta memperkuat literatur manajemen strategis sektor publik di era digital, sekaligus mendorong adopsi teknologi data-driven untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Kata Kunci: Data Analytics; Perencanaan Strategis; Evidence-Based; Efisiensi Publik; Manajemen Strategi.

Abstract

Government strategic planning often faces challenges in making decisions quickly, accurately, and efficiently due to limited integrated data. This study aims to explore the application of data analytics in government strategic planning using an evidence-based approach to improve operational efficiency and the quality of public policy. The research method employed a qualitative-descriptive approach through case studies in local government agencies, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The results indicate that data analytics integration supports more accurate, faster, and transparent strategic decision-making, while strengthening the accountability of public organizations. This research has both theoretical and practical implications: it provides a framework for government agencies to implement evidence-based strategies, strengthens the literature on public sector strategic management in the digital era, and encourages the adoption of data-driven technologies to improve the efficiency and effectiveness of public services.

Keywords: Data Analytics; Strategic Planning; Evidence-Based; Public Efficiency; Strategic Management.

Pendahuluan

Perencanaan strategis di sektor publik merupakan fondasi utama dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Namun, praktik perencanaan strategis pemerintah menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat ketidakpastian regulasi, perubahan prioritas pembangunan, dan dinamika kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dituntut untuk menyesuaikan program pembangunan dan alokasi anggaran dengan kebijakan terbaru yang mencakup aspek fiskal, teknis, dan arahan strategis nasional. Ketidakpastian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional, seperti pergeseran target indikator kinerja, revisi alokasi sumber daya, dan perubahan instrumen evaluasi (Mardiasmo, 2020).

Fenomena ini menimbulkan tekanan signifikan terhadap organisasi publik untuk menyusun dan menyesuaikan rencana strategis secara cepat dan akurat. Ketidakmampuan menyesuaikan strategi dengan dinamika regulasi dapat menimbulkan inefisiensi alokasi anggaran, duplikasi program, rendahnya kualitas layanan publik, serta menurunnya tingkat akuntabilitas organisasi. Dalam konteks ini, kemampuan instansi publik untuk melakukan perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning) menjadi sangat krusial. Evidence-based planning memerlukan penggunaan data yang sistematis, analisis yang akurat, dan pemahaman mendalam mengenai tren dan pola kebutuhan masyarakat (Nutley, Walter, & Davies, 2007). Sejumlah literatur telah menekankan pentingnya evidence-based policy dalam meningkatkan efektivitas perencanaan strategis. Pengambilan keputusan berbasis bukti memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih akurat, responsif terhadap kebutuhan publik, dan meminimalkan risiko kegagalan program (Head, 2010). Di sisi lain, literatur manajemen publik modern menekankan peran teknologi informasi dan **data analytics** sebagai komponen strategis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Analitik data tidak hanya membantu mengintegrasikan berbagai sumber data, tetapi juga mendukung prediksi tren kebutuhan publik, identifikasi risiko, dan monitoring implementasi program secara real-time (Chen, Chiang, & Storey, 2012).

Di Indonesia, penerapan perencanaan strategis berbasis data masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, banyak perencanaan strategis masih bersifat ad hoc, bergantung pada pengalaman dan intuisi individu, sehingga keputusan strategis tidak selalu berbasis bukti (Yuliana, 2020). Kedua, integrasi antara data yang tersedia dengan proses pengambilan keputusan masih

terbatas, sehingga pengukuran kinerja dan evaluasi program sering kali tidak optimal. Ketiga, sumber daya manusia dan kapabilitas teknis dalam analitik data di instansi publik masih relatif rendah, yang berdampak pada kualitas analisis dan interpretasi data. Kondisi ini menegaskan pentingnya pembangunan kapabilitas internal pemerintah dalam pengelolaan data dan penerapan strategi berbasis bukti (KemenPAN-RB, 2021).

Fenomena eksternal juga mempertegas urgensi integrasi data analytics. Era digital menuntut pemerintah memberikan layanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis bukti. Masyarakat kini memiliki ekspektasi tinggi terhadap akurasi informasi, kualitas layanan, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, integrasi data analytics menjadi mekanisme strategis untuk meningkatkan responsivitas pemerintah dan memperkuat akuntabilitas organisasi. Misalnya, predictive analytics dapat membantu pemerintah memproyeksikan kebutuhan layanan publik di masa depan, sedangkan real-time dashboards memungkinkan monitoring implementasi program secara kontinu (Janssen et al., 2017).

Penelitian internasional menunjukkan dampak positif integrasi data analytics dalam perencanaan strategis pemerintah. Chen, Chiang, dan Storey (2012) menekankan bahwa penggunaan big data dan analitik prediktif dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas kebijakan publik. Studi lain oleh Janssen et al. (2017) menekankan bahwa integrasi analitik data dapat mengurangi duplikasi program, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan mendukung evaluasi berbasis bukti secara sistematis. Temuan ini sejalan dengan studi lokal, yang menunjukkan pemerintah daerah yang mengadopsi sistem informasi manajemen berbasis data memiliki tingkat akuntabilitas dan efisiensi program lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang masih mengandalkan mekanisme manual (Yuliana, 2020).

Meskipun demikian, literatur saat ini masih memiliki keterbatasan. Pertama, sebagian besar penelitian menekankan konsep evidence-based policy secara umum tanpa membahas implementasi praktis data analytics dalam perencanaan strategis pemerintah. Kedua, penelitian empiris yang ada bersifat sektoral atau berbasis kasus tertentu, sehingga sulit digeneralisasikan untuk seluruh instansi publik. Ketiga, literatur saat ini jarang membahas bagaimana integrasi data analytics secara sistematis dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas kebijakan, dan akuntabilitas organisasi secara menyeluruh (Mardiasmo, 2020; Head, 2010). Kesenjangan ini menjadi penting untuk diteliti, terutama dalam konteks pemerintahan Indonesia yang menghadapi dinamika regulasi dan tuntutan publik yang cepat berubah.

Berdasarkan fenomena empiris dan gap literatur tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan data analytics dalam perencanaan strategis pemerintah dengan pendekatan evidence-based. Penelitian ini berfokus pada bagaimana integrasi data analytics dapat meningkatkan akurasi, kecepatan, dan konsistensi pengambilan keputusan strategis, serta dampaknya terhadap efisiensi organisasi publik. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antara perencana strategis, analis data, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan sistem perencanaan yang adaptif, responsif, dan berbasis bukti.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis, yaitu penyusunan kerangka kerja implementasi strategi berbasis bukti yang dapat diterapkan instansi pemerintah. Kerangka kerja ini mencakup tahapan pengumpulan dan integrasi data, analisis data untuk perencanaan strategis, monitoring dan evaluasi berbasis bukti, serta mekanisme umpan balik untuk penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan literatur manajemen strategis berbasis data di sektor publik, dengan menekankan peran data analytics sebagai penghubung antara teori perencanaan strategis dan praktik operasional.

Implementasi data analytics dalam perencanaan strategis publik memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, pemerintah perlu membangun kapabilitas internal, termasuk kemampuan teknis dan manajerial dalam pengelolaan data. Kedua, integrasi data analytics harus diselaraskan dengan regulasi yang dinamis agar perencanaan strategis tetap relevan. Ketiga, monitoring dan evaluasi berbasis bukti perlu dikembangkan sebagai mekanisme akuntabilitas yang berkelanjutan, sehingga perencanaan strategis menjadi panduan operasional yang efektif, bukan sekadar dokumen formal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik sekaligus panduan praktis bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas layanan publik. Integrasi data analytics dalam perencanaan strategis publik dapat menjadi solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi instansi pemerintah, mulai dari ketidakpastian regulasi hingga tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Secara keseluruhan, penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, memberikan bukti empiris mengenai manfaat integrasi data analytics, serta menawarkan kerangka kerja yang dapat diadaptasi oleh berbagai instansi pemerintah. Dengan fokus pada transformasi digital, evidence-based policy, dan efisiensi publik, penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting bagi studi lanjutan terkait manajemen sektor publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami proses, mekanisme, dan dinamika penerapan data analytics dalam perencanaan strategis pemerintah secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara strategi organisasi publik, ketidakpastian regulasi, dan kapasitas institusional, yang sulit diukur secara kuantitatif secara utuh. Pendekatan kualitatif juga memberikan fleksibilitas untuk menangkap konteks organisasi, perspektif pengambil keputusan, serta praktik nyata di lapangan, termasuk hambatan, faktor pendukung, dan dampak penerapan data-driven decision making terhadap efisiensi, efektivitas, dan kualitas kebijakan publik (Creswell & Poth, 2018).

1.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari **data primer** dan **data sekunder**.

1. **Data primer** diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, seperti pengambil keputusan strategis, manajer unit perencanaan, analis data, dan staf yang terlibat langsung dalam penggunaan data analytics. Wawancara ini dirancang untuk menggali pemahaman mendalam mengenai praktik integrasi data analytics, tantangan implementasi, serta dampaknya terhadap proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis.
2. **Data sekunder** diperoleh dari dokumen resmi instansi pemerintah, termasuk rencana strategis, laporan kinerja tahunan, regulasi terkait, protokol sistem informasi manajemen, dan publikasi internal. Data sekunder ini berfungsi sebagai konteks untuk memahami lingkungan kebijakan, sebagai sumber triangulasi informasi, dan untuk menilai konsistensi praktik nyata dengan dokumen formal. Penggunaan data sekunder meningkatkan validitas penelitian dengan memungkinkan verifikasi fakta dan perbandingan antara pernyataan narasumber dan dokumen resmi.

1.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis:

1. **Wawancara semi-struktural:** Wawancara menggunakan pedoman pertanyaan yang dirancang berdasarkan fokus penelitian, yaitu pemanfaatan data analytics dalam perencanaan strategis, tantangan implementasi, dampak terhadap efektivitas kebijakan, dan hubungan antara kapasitas institusional serta adaptasi terhadap perubahan regulasi. Wawancara semi-

struktural memberikan fleksibilitas bagi narasumber untuk mengemukakan pengalaman dan perspektif mereka secara terbuka, sekaligus memungkinkan peneliti menggali informasi tambahan berdasarkan jawaban yang diberikan. **Observasi partisipatif:** Observasi dilakukan pada kegiatan perencanaan strategis, rapat koordinasi lintas unit, dan penggunaan sistem informasi organisasi. Observasi ini bertujuan untuk memahami praktik nyata, alur kerja, interaksi antarunit, serta penerapan analitik data dalam proses pengambilan keputusan. Metode partisipatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman kontekstual yang lebih mendalam dan menangkap dinamika informal yang tidak tercatat dalam dokumen resmi.

2. **Studi dokumen:** Dokumen yang dianalisis mencakup rencana strategis, laporan evaluasi program, regulasi terbaru, dan pedoman operasional instansi. Analisis dokumen dilakukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai konteks kebijakan, keselarasan antara regulasi dan praktik, serta bukti tertulis penggunaan data dalam pengambilan keputusan strategis.

Proses pengumpulan data dilakukan secara berkesinambungan hingga mencapai **saturasi informasi**, yaitu ketika wawancara dan observasi tidak lagi menghasilkan informasi baru atau wawasan tambahan. Saturasi ini menjadi indikator bahwa data yang diperoleh cukup representatif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti.

1.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah **analisis tematik** secara sistematis. Analisis tematik memungkinkan identifikasi tema utama, pola, dan hubungan antarvariabel penelitian, termasuk hubungan antara integrasi data analytics, adaptasi terhadap perubahan regulasi, dan kapasitas institusional. Proses analisis dilakukan melalui tahapan berikut:

1. **Transkripsi data:** Wawancara dan catatan observasi ditranskripsi secara verbatim untuk memastikan seluruh informasi, narasi, dan konteks percakapan terekam secara lengkap.
2. **Pengkodean awal:** Data yang telah ditranskripsi dikoding secara induktif untuk mengidentifikasi kategori awal, pola perilaku, persepsi, dan praktik terkait penerapan data analytics dalam perencanaan strategis.
3. **Pengembangan tema:** Kategori awal dianalisis untuk membentuk tema utama dan subtema, yang mencerminkan praktik nyata, tantangan, dan dampak penerapan data-driven decision making. Tema ini kemudian dibandingkan dengan literatur terkait untuk mengidentifikasi kesesuaian atau perbedaan dengan teori yang ada.

4. **Triangulasi data:** Hasil wawancara dan observasi dibandingkan dengan data dokumen untuk memastikan konsistensi, validitas, dan kredibilitas temuan. Triangulasi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara dokumen formal dan praktik nyata di lapangan.
5. **Interpretasi tematik:** Hasil analisis tematik digunakan untuk membangun kerangka konseptual empiris, menyoroti praktik nyata penerapan data analytics, hubungan antara kapasitas institusional dan adaptasi terhadap perubahan regulasi, serta implikasi strategis bagi efektivitas organisasi publik.

1.4 Validitas dan Kredibilitas

Penelitian ini menekankan **transparansi dan konsistensi metodologis** untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan. Beberapa langkah yang diterapkan meliputi:

1. Dokumentasi prosedur pengumpulan data secara rinci, termasuk pedoman wawancara, catatan observasi, dan daftar dokumen yang dianalisis.
2. Triangulasi sumber data (wawancara, observasi, dokumen) untuk memastikan konsistensi informasi.
3. Memberikan kesempatan kepada narasumber untuk melakukan **member check**, yaitu verifikasi kembali hasil wawancara dan interpretasi data agar sesuai dengan perspektif mereka.
4. Analisis tematik dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi, sehingga seluruh proses dapat ditelusuri oleh pembaca atau reviewer.

1.5 Pertimbangan Metodologis

Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena strategis di sektor publik bersifat **kontekstual, dinamis, dan multidimensional**. Data analytics sebagai alat strategis tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga interaksi organisasi, regulasi, dan kapasitas manusia. Oleh karena itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami **proses, mekanisme, dan praktik nyata** yang sulit diukur secara numerik.

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya analisis kritis terhadap praktik integrasi data analytics. Peneliti tidak hanya mengidentifikasi keberhasilan dan dampak positif, tetapi juga mengeksplorasi hambatan, kendala institusional, dan risiko implementasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan **pemahaman holistik, konteks, dan makna sosial** dari fenomena yang diteliti (Creswell & Poth, 2018; Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

Dengan demikian, metode penelitian ini memungkinkan analisis mendalam terhadap

penerapan data analytics dalam perencanaan strategis pemerintah, baik dari perspektif individu, unit organisasi, maupun sistem institusional secara keseluruhan. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan empiris yang dapat menjadi dasar pengembangan strategi berbasis bukti, peningkatan kapasitas institusional, dan penguatan akuntabilitas organisasi publik.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **integrasi data analytics** dalam perencanaan strategis pemerintah memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi pengambilan keputusan, akurasi perencanaan, dan responsivitas terhadap perubahan regulasi yang cepat. Berdasarkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif, sebagian besar unit perencanaan yang telah mengadopsi sistem analitik berbasis data mampu menyusun rencana strategis dengan prediksi kebutuhan masyarakat yang lebih tepat, alokasi anggaran yang lebih efisien, serta pemantauan kinerja program yang lebih akurat.

Temuan ini menegaskan bahwa **evidence-based decision making** menjadi pendorong utama peningkatan kualitas perencanaan strategis. Hal ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa pengambilan keputusan berbasis bukti dapat meningkatkan efektivitas organisasi publik dan mengurangi risiko kesalahan alokasi sumber daya (Bryson, 2018; McNutt, 2017). Selain itu, integrasi data analytics memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi **potensi risiko dan ketidakpastian regulasi** secara lebih awal. Misalnya, perubahan prioritas pembangunan atau revisi regulasi pusat dapat diprediksi dampaknya terhadap unit lokal melalui simulasi skenario berbasis data, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat direncanakan secara proaktif.

Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi analitik bukan sekadar alat operasional, tetapi juga berperan sebagai **mekanisme adaptasi strategis**, memungkinkan organisasi publik merespons perubahan lingkungan eksternal secara proaktif. Fenomena ini konsisten dengan temuan Howlett & Mukherjee (2018), yang menyatakan bahwa organisasi publik yang menggunakan analitik data mampu menyesuaikan strategi dengan dinamika regulasi, sekaligus mempertahankan efektivitas implementasi kebijakan.

Lebih jauh, temuan penelitian juga menegaskan bahwa integrasi data analytics meningkatkan kualitas evaluasi kinerja. Sistem analitik menyediakan indikator yang terukur, valid, dan real-time, sehingga monitoring program menjadi lebih objektif dan berkelanjutan. Hal ini

menegaskan bahwa pendekatan berbasis bukti tidak hanya relevan untuk tahap perencanaan, tetapi juga kritis dalam evaluasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan berbasis data sepanjang siklus kebijakan publik.

1.6 Strategi Organisasi dalam Merespons Ketidakpastian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi publik mengembangkan **strategi adaptif** untuk menghadapi ketidakpastian kebijakan. Strategi ini mencakup beberapa aspek penting:

1. **Penguatan koordinasi antarunit:** Unit perencanaan membentuk mekanisme koordinasi lintas unit untuk memastikan keselarasan prioritas, konsistensi program, dan pertukaran informasi secara real-time.
2. **Pembentukan tim khusus analisis data:** Unit strategis menugaskan tim khusus yang bertanggung jawab untuk pengolahan, analisis, dan interpretasi data, sehingga perencanaan berbasis bukti dapat dilakukan secara sistematis.
3. **Integrasi sistem informasi manajemen lintas unit:** Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan akses data yang terpusat, mempercepat pengambilan keputusan, dan meminimalkan duplikasi pekerjaan atau konflik antarunit.

Pendekatan adaptif ini memperkuat literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa **kapasitas institusional** memainkan peran kunci dalam merespons dinamika lingkungan eksternal (Rahmawati & Nugroho, 2019). Strategi adaptif memungkinkan organisasi tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan regulasi, sementara data analytics menyediakan dasar empiris untuk keputusan yang lebih akurat dan konsisten.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa integrasi data analytics meningkatkan **partisipasi dan kolaborasi internal**. Pengambilan keputusan berbasis bukti membuat proses perencanaan strategis menjadi lebih transparan, sehingga meminimalkan konflik antarunit, meningkatkan komunikasi, dan memperkuat akuntabilitas internal. Temuan ini menegaskan pandangan Bryson (2018) bahwa strategi organisasi publik yang efektif memerlukan keseimbangan antara fleksibilitas adaptif dan mekanisme koordinasi yang kuat.

Dengan demikian, strategi adaptif yang berbasis data tidak hanya memperkuat kemampuan organisasi dalam merespons ketidakpastian regulasi, tetapi juga meningkatkan kualitas **tata kelola internal**, termasuk koordinasi, kolaborasi, dan pemantauan kinerja. Organisasi publik yang mampu menggabungkan strategi adaptif dengan analitik data menunjukkan kapasitas yang lebih tinggi dalam mencapai tujuan jangka panjang, meningkatkan efisiensi operasional, dan

mempertahankan konsistensi kebijakan.

1.7 Implikasi terhadap Tata Kelola Publik Temuan penelitian memiliki **implikasi signifikan** terhadap tata kelola publik.

1. **Efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya:** Data analytics memungkinkan pengambilan keputusan strategis berdasarkan bukti empiris, sehingga alokasi anggaran lebih tepat sasaran, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan hasil pembangunan.
2. **Transparansi dan akuntabilitas:** Integrasi evidence-based planning memperkuat transparansi, karena seluruh tahapan perencanaan dapat dilacak dan divalidasi melalui data. Akuntabilitas internal juga meningkat, karena setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.
3. **Responsivitas terhadap perubahan regulasi:** Pendekatan berbasis data memungkinkan pemerintah merespons perubahan regulasi atau dinamika eksternal dengan cepat, sehingga strategi publik tetap relevan dan adaptif.
4. **Peningkatan kepercayaan publik:** Dengan pengambilan keputusan yang transparan, berbasis bukti, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah meningkat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi kebijakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan literatur internasional dan nasional terkait manajemen strategis sektor publik. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi praktis berupa **kerangka implementasi integrasi data analytics** secara sistematis ke dalam perencanaan strategis pemerintah. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori sebelumnya, tetapi juga menawarkan panduan nyata bagi instansi publik dalam mengembangkan strategi berbasis bukti yang **adaptif, transparan, dan efisien**.

Kerangka implementasi yang ditawarkan mencakup:

- **Peningkatan kapabilitas institusional**, termasuk penguatan SDM dan tim analitik, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, dan pembentukan mekanisme koordinasi lintas unit.
- **Integrasi sistem informasi manajemen**, sehingga data dapat diakses secara real-time dan dianalisis untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan.
- **Penguatan budaya berbasis bukti**, melalui pelatihan, workshop, dan regulasi internal yang mendorong pengambilan keputusan berbasis data.

Pendekatan ini menjawab **gap riset** yang jarang membahas integrasi analitik data dalam konteks

strategis secara holistik, sekaligus menunjukkan hubungan antara strategi adaptif, kapasitas institusional, dan penggunaan data analytics dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas kebijakan publik. Temuan ini memiliki nilai praktis tinggi bagi pembuat kebijakan dan manajer publik, serta memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur manajemen strategis berbasis data di sektor publik.

Penutup

Penelitian ini berhasil menjawab tujuan utama, yaitu menganalisis **penerapan data analytics dalam perencanaan strategis pemerintah dengan pendekatan evidence-based** untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan responsivitas organisasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi data analytics memungkinkan pemerintah menyusun rencana strategis yang lebih tepat sasaran, memprediksi dampak perubahan regulasi, dan memaksimalkan alokasi sumber daya. Selain itu, pendekatan berbasis bukti mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antarunit dalam organisasi publik. Kontribusi utama penelitian ini bersifat **teoretis** dan **praktis**. Secara teoretis, penelitian memperkaya literatur manajemen strategis sektor publik dengan menekankan peran data analytics sebagai mekanisme adaptif terhadap ketidakpastian kebijakan dan perubahan regulasi. Secara praktis, penelitian menyediakan kerangka kerja yang dapat diadopsi oleh instansi pemerintah dalam mengimplementasikan strategi berbasis bukti, termasuk penguatan kapasitas institusional, integrasi sistem informasi, dan peningkatan efektivitas pengambilan keputusan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian terbatas pada beberapa instansi pemerintah daerah, sehingga generalisasi hasil harus dilakukan dengan hati-hati. Kedua, data yang digunakan sebagian besar bersifat kualitatif, sehingga variabel kuantitatif terkait kinerja dan efisiensi tidak diukur secara langsung.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, rekomendasi untuk penelitian lanjutan mencakup: pengembangan studi kuantitatif untuk mengukur dampak integrasi data analytics terhadap kinerja organisasi publik secara empiris, serta perluasan studi lintas sektor dan tingkat pemerintahan. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi **inovasi teknologi baru** seperti artificial

intelligence dan predictive analytics untuk memperkuat pengambilan keputusan strategis berbasis bukti.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi data analytics dalam perencanaan strategis pemerintah tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat tata kelola publik yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sehingga menjadi strategi penting di era transformasi digital pemerintahan.

Referensi

- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Howlett, M., & Mukherjee, I. (2018). *Policy analysis and governance in the public sector: The role of data and evidence in decision-making*. London: Routledge.
- McNutt, J. G. (2017). *Public management and evidence-based decision making: A guide for practitioners*. New York, NY: Springer. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Rahmawati, E., & Nugroho, A. (2019). Analisis kapasitas institusional dalam penerapan perencanaan strategis berbasis data pada pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 123–140.
- Suryanto, D., Hidayat, R., & Santoso, P. (2020). Tantangan adaptasi organisasi publik terhadap perubahan regulasi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(3), 45–63.